



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROMA MANURUNG
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 953297

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q50L1/AT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, HONDA N1N02Q54L2 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 36.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 14.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 129.754.867

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 844.254.867

III. HUTANG Rp. 15.293.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 828.961.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.